



KR-Antara/Hendra Nurdiansyah

JEMBATAN PENGHUBUNG JJLS: Pekerja menyelesaikan pembangunan Jembatan Kretek Dua di Depok, Parangritis, Kretek, Bantul, Kamis (15/4). Pembangunan Jembatan Kretek Dua tersebut sebagai penghubung Jalur Jalan Lintas Selatan (JLSS) di sepanjang Pantai Selatan Jawa (Pansela) yang direncanakan membentang dari Banten sampai Blambangan, Jawa Timur.

Insya Allah Tahun Ini Ada Haji

JAKARTA (KR) - Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Esam Abid Altaghafi optimistis haji diselenggarakan pada tahun 2021. Meskipun dengan kuota yang sangat terbatas.

"Insya Allah akan ada berita bagus terkait hal itu. Kami juga masih menunggu informasi ataupun berita terbaru, tapi insya Allah akan ada ibadah haji untuk muslim di Indonesia serta muslim di dunia," ujar Esam Abid kepada wartawan saat peluncuran pemberian paket sembako dan kurma di Jakarta, Kamis (15/4).

Dubes Esam belum dapat memastikan kapan penyelenggaraan haji resmi diumumkan kepada muslim di Indonesia maupun di negara lain. "Bagi muslim di Indonesia dan juga bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia apa yang harus mereka siapkan yakni terkait vaksinasi," katanya.

Mereka yang mengikuti ibadah haji harus divaksin Covid-19 terlebih dahulu sesuai regulasi yang berlaku. "Vaksin itu terkait dengan jenis vaksin dan tentu saja itu adalah hal utama dan nantinya kita akan mengetahui kuota kemudian," ujar Dubes.

Ia menambahkan, untuk pelaksanaan haji tahun ini, kouta yang tersedia untuk jemaah Indonesia akan sama dengan negara lainnya.

Belum lama ini Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyebut akan memberikan izin umrah dan kunjungan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bagi mereka yang sudah divaksinasi mulai bulan Ramadan. Pemberian izin itu sesuai ketentuan di aplikasi Tawakkalna untuk kategori imunisasi.

* Bersambung hal 7 kol 1

Nekat Mudik, Harus Putar Balik

Penyekatan Masuk DIY di 10 Titik

YOGYA (KR) - Pemerintah pusat telah memutuskan pelarangan mudik lebaran mulai 6 Mei sampai 17 Mei. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Pemda DIY akan melaku-

kan penyekatan di 10 titik yang ada di daerah perbatasan DIY bagi masyarakat yang tidak mentaati atau nekat melakukan perjalanan menggunakan kendaraan umum maupun pribadi,

jadinya penularan Covid-19.

"Karena bentuknya larangan bagi masyarakat yang tidak mentaati atau nekat melakukan perjalanan menggunakan kendaraan umum maupun pribadi,

maka akan langsung diminta berputar balik. Jadi tidak lagi pengecekan swab PCR atau rapid antigen seperti saat libur panjang kemarin," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K

Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Kamis (15/4).

Menurut Baskara Aji, selama periode pelarangan tersebut, petugas akan memperketat pemeriksaan di 10 titik di daerah

perbatasan. Namun demikian Baskara tidak merinci tempat yang masuk 10 titik tersebut.

Jadi tidak sekadar melakukan pemeriksaan surat keterangan

* Bersambung hal 7 kol 1



Analisis KR ASPD dan PPDB Ki Sugeng Subagya

DI BALIK isu bocornya soal dan jawaban Asesmen Standar Pendidikan Daerah (ASPD), betapa pentingnya memaknai proses dan penilaian pendidikan yang lebih substantif dari pada sekadar capaian skor akademik. Integritas, kejujuran, disiplin, dan taat asas jauh lebih bermakna dibandingkan dengan tingginya prestasi kognitif. Selain itu, pragmatisme menghalalkan segala cara untuk tercapainya tujuan tertentu adalah noda pekat dunia pendidikan kita.

Banyak pihak tidak habis mengerti, pasca-penghapusan ujian nasional (UN) masih ada upaya kecurangan dalam penilaian pendidikan. Bukankah segala bentuk penilaian pendidikan, termasuk di dalamnya keputusan kenaikan kelas dan kelulusan sepenuhnya diserahkan kepada guru? Tidak tepat ASPD dianggap memiliki kadar émenakutkan sebagaimana UN.

Konsep dasar ASPD ialah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan, jenjang SD/MI/Paket-A/Ulya, dan SMP/MTs/B-Wustha, pada mata pelajaran tertentu di DIY dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. ASPD dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan. Dirancang untuk menghasilkan informasi akurat tentang perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antarbagian dalam sistem pendidikan.

* Bersambung hal 7 kol 5

SATGAS KAPANEWON AGAR PERKETAT PENGAWASAN Pasar Sore Ramadan Harus Kedepankan Prokes

YOGYA (KR) - Kerumunan yang terjadi dalam aktivitas pasar sore Ramadan menjadi perhatian Satpol PP DIY. Untuk mengantisipasi terjadinya penularan atau klaster baru Covid-19, Satpol PP DIY meminta Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kemantren/Kapanewon lebih ketat dalam melakukan pengawasan. Sebab jika sampai langkah dan telodor, dikhawatirkan bisa muncul kasus penularan Covid-19 yang akhirnya akan merugikan semua pihak.

"Meski kebijakan Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) Mikro terus saja diperpanjang, kasus baru Covid-19 di DIY masih fluktuatif. Untuk itu saya minta Satgas Covid-19 Kemantren/Kapanewon bisa lebih ketat dalam melakukan pengawasan di titik-titik keramaian, termasuk pasar sore Ramadan. Bahkan jika diperingat tetap membandel, Satgas Kemantren/Kapanewon bisa membubarkan

* Bersambung hal 7 kol 1

GUBERNUR DIY INGATKAN PENGUSAHA THR Wajib Dibayarkan Penuh

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan supaya perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja. Sesuai ketentuan yang ada, perusahaan diwajibkan untuk membayar THR Idul Fitri 1442 H. Hal itu diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Menteri No 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

"Saya berharap kalau untuk THR sesuai dengan ketentuan yang sudah ada harus dibayarkan perusahaan kepada para pekerja. Saya minta THR dibayarkan secara penuh. Sebab, hal itu sesuai ketentuan yang ada. Jadi THR harus dibayarkan," tegas Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Kamis (15/4).

Komentar senada diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Aria Nugrahadi. Menurutnya, sesuai SE Kemenaker terkait THR 2021 pengamanan kewajiban pembayaran THR dari perusahaan kepada para pegawainya tanpa dicil. Kebijakan itu berbeda dengan SE Kemenaker untuk THR tahun 2020. Karena sudah ada ketentuan yang mengatur secara jelas, pihaknya berharap, para pengusaha bisa melaksanakan kebijakan tersebut sebaik-baiknya. "Kami berharap para pemilik perusahaan bisa mentaati hal tersebut," ujar Aria.

* Bersambung hal 7 kol 5

Di rumah saja, langkah bijak hindari Covid-19

BEBAS KHAWATIR DENGAN LAYANAN HOME CARE

Hotline : 0811 2855 872 - 0274 550059/60

0274 550059/60 | 0274 550059/60 | 0274 550059/60 | 0274 550059/60 | 0274 550059/60

DATA KASUS COVID-19 Kamis, 15 April 2021

1. Nasional:	2. DIY:
- Pasien positif : 1.589.359 (+6.177)	- Pasien positif : 36.461 (+221)
- Pasien sembuh : 1.438.254 (+6.362)	- Pasien sembuh : 30.793 (+267)
- Pasien meninggal : 43.073 (+167)	- Pasien meninggal : 879 (+5)

Sumber: Satuan Tugas/Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional/Pemda DIY. (KR-Ria/Ira)

Jadwal Imsakiyah	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Imsak	Subuh
	11:42	15:01	17:39	18:49	04:15	04:25

Jumat, 16 April 2021 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

DOMPET 'KR'

Bersama Kita Melawan Virus Korona
Migunani Tumraping Liyan

MARI kita bershodaqoh dengan niat untuk menolak wabah virus korona atau Covid-19 untuk diri sendiri maupun orang-orang lain. Shodaqoh Bapak/Ibu para dermawan bisa diserahkan secara langsung ke Bagian Keuangan KR setiap hari kerja, pukul 09.30-13.30 (hari libur nasional dan Sabtu-Minggu tutup). Atau transfer ke rekening BCA 126.556.5656 atas nama BP Kedaulatan Rakyat PT. (Foto bukti transfer mohon dikirim ke WA 081 2296 0972. Berikut dermawan yang sudah menyumbang:

NO	NAMA	ALAMAT	RUPIAH
888	Sumaryati (Alm)	pare Godean	100,000.00
889	Tri W	Godean	50,000.00
JUMLAH			Rp 150,000.00
s/d 14 April 2021			Rp 463,007,768.00
s/d 15 April 2021			Rp 463,157,768.00

(Empat ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)-
(Siapa menyusul?)

EDHY PRABOWO DIDAKWA TERIMA RP 25,75 M

Perkara Suap Benih Benur Mulai Disidangkan

JAKARTA (KR) - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggelar sidang perdana perkara yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo sebagai terdakwa. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Worotikan dalam dakwaannya menyatakan, Edhy Prabowo didakwa menerima 77 ribu dolar AS dan Rp 24,625 miliar, sehingga total mencapai Rp 25,75 miliar dari para pengusaha pengeksport benih benur.

"Terdakwa Edhy Prabowo selaku Menteri KP melalui Amiril Mukminin dan Safri menerima uang sejumlah 77 ribu dolar AS dari Suharjito selaku pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) dan me-

lalui Amiril Mukminin, Ainul Faqih, Andrea Mi-santa Pribadi dan Siswadi Pranoto Loe menerima

uang sebesar Rp 24,625 miliar," ungkap jaksa Ronald Worotikan saat membaca dakwaan di Pengadilan

Tipikor Jakarta, Kamis (15/4).

Atas perbuatannya, Edhy Prabowo didakwa dan dian-

cam pidana berdasarkan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999

* Bersambung hal 7 kol 1



KR-Antara/Dhomas Reviyanto

Edhy Prabowo usai menjalani sidang perdana kasus dugaan suap izin ekspor benur secara virtual dari Pengadilan Tipikor.

SUNGGUH SANGGUH Terjadi

● SUDAH tiga kali kerongkongan saya sakit karena ada duri ikan lele yang tersangkut. Untuk menghilangkan duri tersebut, saya periksa ke dokter. Dokter tidak memberi resep, tetapi hanya menyarankan saya membeli bakpao dan memakannya. Setelah makan secuil bakpao, ternyata sakit di kerongkongan sudah lenyap. (Amien Trisunu, SDN Gambiranom Condongatur, Depok Sleman)-f